

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Penelitian

Tuntutan terhadap sektor publik, mewajibkan lembaga-lembaga publik khususnya pemerintah daerah untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Transparansi dan akuntabilitas dapat terwujud apabila LKPD telah memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yakni relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Laporan keuangan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku (Nordiawan, 2010: 8). 4 (empat) karakteristik berikut merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami (Tanjung, 2012:3).

Pola pertanggungjawaban pemerintah daerah saat ini lebih bersifat horizontal (pemerintah daerah bertanggungjawab kepada DPRD maupun pada masyarakat). Namun pada kenyataannya sebagian besar pemerintah daerah lebih menitikberatkan pertanggungjawabannya kepada DPRD daripada masyarakat. Untuk menghasilkan laporan keuangan sektor publik yang relevan dan dapat diandalkan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi akuntansi sektor publik. Hambatan tersebut adalah objektivitas, konsistensi, daya banding, tepat waktu, ekonomis dalam penyajian laporan, dan materialistik. Laporan keuangan menunjukkan adanya pertanggung jawaban atas pengelolaan dana desa. Berdasarkan hasil prasurvei mengenai dana desa diperoleh data pengalokasian dana desa pada tahun 2016-2019 sebagai berikut:

Tabel 1. Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Tahun	Besar Anggaran	Sumber Anggran
2016	Rp. 1.875.542.000	PAD dan Bantuan Pemerintah
2017	Rp. 1.987.642.000	PAD dan Bantuan Pemerintah
2018	Rp. 2.221.761.000	PAD dan Bantuan Pemerintah
2019	Rp. 2.690.599.000	PAD dan Bantuan Pemerintah

Sumber: Dokumentasi Laporan Keuangan Desa Bumi Raharjo Tahun 2019

Berdasarkan Tabel 1 di atas bahwa APBDesa mengalami peningkatan selama tahun 2016-2017. Dana-dana tersebut telah dialokasikan untuk masyarakat dan pembangunan desa. Setelah data di alokasikan maka pemerintah desa wajib membuat laporan yang akan di sampaikan kepada pemerintah Daerah. Laporan keuangan akan diterima dan mendapat pemeriksaan dari BPK.

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2020 Badan Pemeriksa Keuangan, pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah bertujuan untuk memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam LKPD.

Hasil pemeriksaan keuangan atas LKPD disajikan dalam 3 bagian yaitu opini, sistem pengendalian intern (SPI), dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Hasil pemeriksaan BPK atas 357 LKPD tahun 2020 menunjukkan terdapat 871 kasus kelemahan SPI. Rincian kelemahan SPI tersebut meliputi kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan sebanyak 453 kasus, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja sebanyak 321 kasus, dan kelemahan struktur pengendalian intern sebanyak 97 kasus.

Selain itu, hasil pemeriksaan juga menemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan.

Hasil pemeriksaan keuangan semester II tahun 2020 mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 1.789 kasus. Berdasarkan IHPS II tahun 2020 BPK dilaporkan bahwa dari 357 LKPD tahun 2020, BPK memberikan opini WTP atas 291 LKPD, opini WDP atas 21 LKPD, opini TW atas 7 LKPD, opini TMP atas 38 LKPD. Fenomena kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah dari tahun 2016-2020 ditunjukkan pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Perkembangan Opini LKPD Tahun 2016-2020

LKPD Tahun	Opini								Jumlah
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%	
2016	212	36%	231	39%	56	9%	97	16%	596
2017	229	41%	178	32%	45	8%	106	19%	558
2018	245	42%	201	35%	42	7%	89	15%	577
2019	315	52%	187	31%	32	5%	70	12%	604
2020 (SMT I)	381	56%	176	26%	18	3%	100	15%	675
2020 (SMT II)	291	82%	21	6%	7	2%	38	11%	357

([www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)) Tahun 2021

Sumber: Ihtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 dan II Tahun 2020

Berdasarkan tabel 1 di atas bahwa perkembangan opini LKPD tahun 2016-2020 mengalami fluktuatif. Pada setiap tahun banyak lembaga yang mendapatkan opini WTP. Peningkatan kualitas menunjukkan bahwa sistem informasi keuangan di pemerintah daerah mulai menunjukkan perubahan dan perbaikan. Pemerintah daerah yang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan Tidak Wajar (TW) semakin menurun dari tahun ke tahun, dan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) mengalami penurunan dari tahun 2016 sampai 2020 semester I, semakin naik pada tahun 2020 semester II. Walaupun predikat laporan keuangan pemerintah daerah telah mengalami peningkatan kualitas dengan predikat WTP, akan tetapi hal ini bukan merupakan suatu indikator keberhasilan dalam pemerintah daerah mengelola keuangan. Pemerintah daerah yang mendapat opini WTP berarti telah mampu secara memadai dalam mengelola keuangan yang diamanatkan. Hal ini juga menunjukkan komitmen kepala daerah untuk mewujudkan pengelolaan sesuai dengan prinsip good government dan merupakan tujuan yang harus dicapai serta keseriusan dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban pelaksanaan program, namun bukan sebagai jaminan tidak ada kecurangan (Fatimah, 2014:12).

Berdasarkan fenomena tersebut dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah belum memenuhi kriteria kualitas informasi laporan keuangan seperti yang disyaratkan. Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu seperti Choirunisah (2018) penelitiannya menyebutkan bahwa Sistem pengendalian internal dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Indriasari dkk (2018) hasil

penelitiannya menyebutkan bahwa ada banyak faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan diantaranya adalah komitmen organisasi, sistem pengendalian internal, kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan Teknologi Informasi. Adapun hasil penelitiannya juga menyebutkan bahwa pengendalian internal memiliki pengaruh sebesar 78% terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan pada komitmen organisasi sebesar 89%.

Penelitian Winidyaningrum dan Rahmawati (2010:76) menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah Komitmen Organisasi, Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan TI, dan Pengendalian Internal. Sebuah perusahaan atau organisasi harus memiliki komitmen untuk mencapai kualitas laporan keuangan yang memadai. Sumber daya manusia sangat penting dalam menentukan kualitas laporan informasi keuangan, Informasi laporan keuangan akan maksimal apabila diimbangi dengan pemanfaatan Teknologi dan pengendalian internal.

Aryani (2013) menyebutkan bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK tahun 2013, LKPD kota Pekanbaru mendapat opini WDP. Kabupaten Bengkalis mendapat opini WDP tahun 2012, setelah opini TMP tahun 2011, kab. Siak mendapat opini WTP DPP tahun 2013. Perkembangan opini LKPD yang perlu dicermati adalah kemungkinan perolehan opini WTP tidak hanya untuk pemerintah daerah yang sudah lama terbentuk namun juga bagi pemerintah daerah yang baru terbentuk melalui pemekaran wilayah.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK tahun 2019, LKPD Kecamatan Bumiratu Nuban mendapat opini WDP. Kabupaten Lampung Tengah mendapat opini WDP. Perkembangan opini LKPD yang perlu dicermati adalah kemungkinan perolehan opini WTP tidak hanya untuk pemerintah daerah yang sudah lama terbentuk namun juga bagi pemerintah daerah yang baru terbentuk melalui pemekaran wilayah. Untuk pemerintah daerah yang sudah lama terbentuk, tentu lebih dulu memiliki kemampuan dalam hal dukungan teknis dan fasilitasi peningkatan kemampuan kelembagaan pemerintahan daerah, Sumberdaya manusia, kepegawaian daerah, pengelolaan keuangan daerah, dan pelayanan publik bila dibandingkan dengan pemerintah daerah yang baru terbentuk melalui pemekaran wilayah.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kualitas laporan keuangan akan baik apabila organisasi memiliki komitmen yang tinggi dalam pencapaian tujuan. Apabila organisasi tidak memiliki komitmen yang tinggi maka kualitas laporan keuangan akan rendah.
2. Kualitas laporan keuangan akan mendapatkan predikat yang baik apabila dipegang dan dikelola oleh sumber daya manusia yang berkompeten dibidangnya. Apabila laporan disusun oleh orang yang kurang kompeten dalam bidang akuntansi maka kualitas laporan keuangan tidak akan maksimal.
3. Kualitas laporan akan semakin baik apabila didukung dengan teknologi yang memadai.
4. Kualitas laporan akan baik jika didukung oleh pengendalian internal yang baik dari pimpinan organisasi.

## **C. Perumusan Masalah Penelitian**

Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi dalam laporan keuangan sehingga dapat dinyatakan wajar atau tidak wajar, layak atau tidak layak. Oleh sebab itu, perlu adanya kerjasama antara pihak-pihak terkait dalam menyusun laporan keuangan sehingga dalam suatu organisasi dapat tercipta kualitas informasi keuangan yang wajar tanpa ada pengecualian.

Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan permasalahan penelitian ini adalah:

1. Apakah Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa Bumi Raharjo Kecamatan Bumiratu Nuban?
2. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa Bumi Raharjo Kecamatan Bumiratu Nuban?

3. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa Bumi Raharjo Kecamatan Bumiratu Nuban?
4. Apakah Pengendalian intern berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa Bumi Raharjo Kecamatan Bumiratu Nuban?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa Bumi Raharjo Kecamatan Bumiratu Nuban.
2. Untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa Bumi Raharjo Kecamatan Bumiratu Nuban.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa Bumi Raharjo Kecamatan Bumiratu Nuban.
4. Untuk mengetahui pengaruh pengendalian intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa Bumi Raharjo Kecamatan Bumiratu Nuban.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Bagi Pemerintah Desa

Sebagai program tindak lanjut untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kualitas informasi sistem laporan akuntansi keuangan sehingga dapat menjadi rujukan untuk perbaikan kualitas atau mempertahankan kualitas informasi sistem keuangan.

2. Bagi Peneliti

Sebagai sarana mengembangkan ilmu pengetahuan, penelitian ilmiah, menambah wawasan dan sebagai aplikasi dari teori-teori yang telah didapatkan peneliti pada masa perkuliahan.

### 3. Bagi Akademik

Sebagai bahan masukan dan referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap masalah kualitas informasi sistem akuntansi keuangan.